

PENCEGAHAN FRAUD PADA PEMERINTAHAN DESA

Provita Wijayanti
Rustam Hanafi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jl. Kaligawe Raya No. KM, Semarang 50112
surel: provita.w@unissula.ac.id

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 9
Nomor 2
Halaman 331-345
Malang, Agustus 2018
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
13 Oktober 2017
Tanggal Revisi:
02 Agustus 2018
Tanggal Diterima:
31 Agustus 2018

Abstrak: Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah pengaruh sejumlah variabel terkait individu dan budaya terhadap kecenderungan *fraud*. Metode yang digunakan adalah analisis regresi *dummy* berganda dengan 40 perangkat desa di Kecamatan Sayung, Demak sebagai sampel. Temuan utama dari penelitian ini adalah pemupukan moralitas individu perangkat pemerintah desa yang baik dapat mencegah kecenderungan *fraud*. Upaya pemupukan moralitas individu dapat dilakukan melalui pembinaan kepada aparat perangkat desa, seperti peningkatan iman dan takwa, syukur, sabar, dan peningkatan kesalehan diri.

Abstract: The Fraud Prevention in Village Government. The purpose of this study is to examine the effect of a number of variables related to individuals and culture on fraud tendencies. The method used is multiple *dummy* regression analysis with 40 village apparatuses in Sayung sub-district, Demak as samples. The main finding of this study is that the cultivation of individual morality in a good village government can prevent fraud. This can be done through guidance to village officials, such as increasing faith and piety, gratitude, patience, and increasing self-righteousness.

Kata kunci: karakteristik personal, struktur pengendalian internal, budaya etis organisasi

Pengucuran dana APBN ke pemerintah desa yang dimulai pada tahun 2015 bernilai triliunan rupiah. Pengucuran dana desa tersebut dilakukan sebanyak 3 tahap setiap tahunnya. Dana desa yang telah dikucurkan tersebut akan langsung ditransfer dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) yang dipegang Pemkab atau Pemkot. Pengelolaan keuangan desa tersebut agar sesuai target dan sasaran pemerintah diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk membantu merencanakan, membuat anggaran program dan kegiatan, serta mengelola keuangan desa meliputi pelaporan dan pelaksanaannya bersama perangkat desa. Setelah adanya pengesahan undang-undang tentang Dana Desa yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014, Desa mendapatkan supply dana

APBN hingga Rp1 miliar. Pengambilan dana dapat dilakukan beberapa kali di tahun 2015. Pemerintah Pusat akan memberikan dana APBN-Desa kepada Pemerintah Desa secara langsung agar pembangunan desa berjalan dengan lancar dan pelaporan anggaran desa wajib dilaksanakan oleh masing-masing desa. Melalui pelaporan anggaran desa diharapkan kecenderungan *fraud* dapat dihindari. Beberapa kasus penyalahgunaan dana desa telah dilaporkan antara lain dilakukan oleh enam orang kepala desa di Kabupaten Seram bagian Timur Maluku pada tahun 2015; penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa Sumberlawang, Sragen tahun 2016; penyelewengan dana desa yang melibatkan empat pejabat Kabupaten Pamekasan di Jawa Timur tahun 2017 dan untuk menghindari terulangnya peristiwa-peristiwa

fraud tersebut Pemerintah disarankan untuk mengevaluasi seluruh tahap penyaluran dana desa (BBC News Indonesia, 2017).

Beberapa peneliti (Kuang & Lee, 2017; Nikmatuniayah, 2012; Yang, Jiao, & Buckland, 2017) *fraud* dapat disebabkan oleh karakteristik-karakteristik individual seperti usia dan jenis kelamin. Pada tahun 2016, 37% tindakan *fraud* dilakukan pada rentang usia 36-45 tahun, 31% pada rentang usia 46-55 tahun, dan 23% dilakukan pada usia <36 tahun dan >55 tahun. Menurut faktor jenis kelamin, 79% laki laki lebih cenderung melakukan *fraud* sedangkan wanita hanya 17%. *Fraud* juga dipengaruhi oleh adanya peluang sehingga untuk mencegah peluang tersebut diperlukan pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal ini akan menghasilkan informasi dan laporan bebas salah saji Andon, & Free, & Scard (2015). Budaya etis organisasi juga dapat menjadi faktor pengendali *fraud*. Barra (2010) dan Donelson, Ege, & McInnis (2017) menyebutkan bahwa karyawan yang bekerja di lingkungan etis akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan *fraud*. Moralitas individu juga berperan serta terhadap kecenderungan *fraud*. Moral ini dapat berupa tindakan manusia baik yang bernilai positif (bermoral) maupun negatif (amoral) (Urumah, Wicaksono, & Hardinto, 2018; Utami, Jori, & Hapsari, 2017). Moralitas tercermin dari tindakan perilaku baik seseorang yang berasal dari diri sendiri.

Fraud menjadi problem yang harus dipurangi bagi sektor publik ataupun swasta khususnya di Indonesia. Auditor internal yang kompeten dalam mengevaluasi laporan keuangan dan mampu mengefektifkan operasi organisasi diperlukan untuk meminimalisasi risiko *fraud* (Hoi & Robin, 2010). Penguatan struktur pengendalian internal, optimalisasi aktivitas pengendalian, juga fungsi internal audit yang efektif merupakan strategi-strategi pencegahan *fraud* (Kartini, 2018). *Fraud* sudah merambah di Indonesia tetapi belum banyak penelitian teoritis yang relevan. Penelitian terkait pencegahan *fraud* sebelumnya dilakukan oleh Barra (2010), Hollow (2014), Okura (2013), Doig (2014), Kern (2016), Donelson, Ege, & McInnis (2017), Andon, Free, & Scard (2015), Barua, Davidson, Rama, & Thiruvadi (2010), Bishop, Hermanson, & Riley (2017), Berger, Perreault, & Wainberg (2017), Mihret (2014), dan Kartini (2018). Faktor terkait dengan

pencegahan *fraud* yang telah diteliti sebelumnya antara lain kualitas prosedur pengendalian internal dan keadilan organisasi (Barra, 2010); sistem pengendalian internal, kompensasi, kepatuhan pada norma akuntansi, dan *unethical behavior* (Hollow, 2014); keadilan distributif, komitmen organisasi, efektivitas pengendalian internal, keadilan prosedural, dan penegakan aturan, asimetri informasi, dan budaya etis organisasi (Doig, 2014); pengalaman kerja, skeptisme profesional, dan tekanan waktu (Kern, 2016); budaya etis organisasi dan efektivitas pengendalian internal (Donelson, Ege, & McInnis, 2017); efektivitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi (Andon, Free, & Scard, 2015); moralitas individu dan pengendalian internal (Berger, Perreault, & Wainberg, 2017; Mihret, 2014; Okura, 2013); *gender*, keahlian dan skeptisisme profesional (Barua, Davidson, Rama, & Thiruvadi, 2010; Bishop, Hermanson, & Riley, 2017); penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif (Kartini, 2018).

Teori dasar penelitian ini yaitu *agency* dan GONE. Boyle, DeZoort, & Hermanson (2015) dan Gonzalez & Hoffman (2018) mendefinisikan keterkaitan antara *principal* dan agen dalam mendeteksi *fraud*. Teori ini bertujuan untuk menyelesaikan problem dalam hubungan keagenan antara *principal* dan agen yang berbeda dinamakan sebagai *agency problems* (Davies, 2017). Teori agensi tersusun dari tiga asumsi meliputi: *self interest* (mementingkan diri sendiri), *bounded rationality* (berdaya pikir terbatas tentang persepsi masa mendatang, dan *risk averse* (tidak menyukai risiko). *Prinsipal* juga membutuhkan informasi terkait dengan keadaan tempat, kondisi, dan kinerja agen. *Exposure* (pengungkapan), terkait dengan tindakan atau konsekuensi bagi pelaku *fraud* apabila pelaku terbukti melakukan *fraud*. Sementara itu, GONE *theory* dijabarkan sebagai *Greeds* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan) melakukan *fraud*, *Needs* (kebutuhan untuk menunjang kehidupan, dan *Exposure* (pengungkapan) tindakan atau konsekuensi bagi pelaku *fraud* apabila pelaku terbukti melakukan *fraud*. *Exposure* berkaitan dengan proses pembelajaran perbuatan *fraud* karena dianggap sanksi yang diberikan tergolong ringan. Faktor *greeds* dan *needs* berkaitan dengan perilaku individu ataupun kelompok organisasi untuk melakukan kecurangan (*fraud*) sehingga merugikan korban. Keserakahan dan kebutuhan bersifat

personal dan sulit dihilangkan sehingga cenderung melanggar peraturan, sedangkan faktor *opportunity* dan *exposure* berkaitan dengan korban (masyarakat, instansi, dan organisasi) yang merasa dirugikan karena perbuatan kecurangan (*fraud*).

Kebaruan penelitian ini adalah menggabungkan *agency* dan *GONE theory* dan menambahkan beberapa komponen karakteristik personal. Meskipun *agency* dan *GONE theory* telah banyak diteliti, hasil yang dilaporkan berbeda-beda. Pada penelitian sebelumnya karakteristik personal yang diteliti adalah pengalaman kerja dan *gender*. Penelitian ini menambahkan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan dalam faktor karakteristik personal. Efektivitas sistem pengendalian internal dalam penelitian Barra (2010) dan Doig (2014) berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*, dalam penelitian Donelson, Ege, & McInnis (2017), Berger, Perreault, & Wainberg (2017) dan Mihret (2014) berpengaruh negatif, sedangkan pada penelitian Hollow (2014) serta Okura (2013) tidak memiliki pengaruh pada kecenderungan *fraud*. Budaya etis organisasi dalam penelitian Donelson, Ege, & McInnis (2017) ditemukan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* tetapi dalam penelitian Najahningrum (2013) tidak berpengaruh. Moralitas individu dalam penelitian Okura (2013) merupakan variabel *moderating* dari hubungan pengendalian internal dengan kecenderungan *fraud*, sementara dalam penelitian Mihret (2014) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*.

METODE

Populasi penelitian ini berjumlah 100 orang perangkat desa yang berasal dari 20 desa di Kecamatan Sayung. Dari jumlah populasi tersebut dengan menggunakan teknik *convenience sampling* ditetapkan 2 orang perangkat desa meliputi kepala desa (kades), bendahara desa, sekretaris desa atau kepala urusan (kaur) pembangunan yang secara sukarela bersedia berpartisipasi untuk penelitian ini. Menurut laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) personil-personil yang menduduki jabatan tersebut adalah yang rentan melakukan *fraud*. Dengan ditetapkannya 2 orang perangkat untuk mewakili tiap desa, maka diperoleh 40 orang sebagai sampel.

Peneliti memilih teknik *convenience sampling*. Hal ini dilakukan dasar kemudahan, tidak ada kriteria yang ditetapkan me-

lainkan menurut perangkat desa yang bisa ditemui atau yang bersedia menjadi responden (Fitriana & Baridwan, 2012; Utami, Jori, & Hapsari, 2017). Adapun alasan memilih meneliti kecenderungan *fraud* perangkat desa di Kecamatan Sayung adalah rata-rata desa-desa di Kecamatan Sayung ini memperoleh kucuran dana desa lebih besar daripada kucuran dana desa untuk kecamatan lain di Kabupaten Demak. Tahun anggaran 2016 alokasi dana desa (ADD) untuk Kecamatan Sayung 0,6% lebih tinggi daripada Kecamatan Guntur dan 37,4% lebih tinggi dari ADD untuk Kecamatan Wonosalam (Lampiran SP2D Kabupaten Demak, 2016). Selain itu desa-desa di Kecamatan Sayung juga termasuk desa binaan dalam pengabdian masyarakat dosen Unissula Semarang, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencegahan *fraud* dana desa yang diawali dari daerah binaan.

Kecenderungan *fraud* merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Indikator-indikator yang digunakan untuk merepresentasi variabel kecenderungan *fraud* diadopsi dari penelitian Hoi & Robin (2010) dan Andon, Free, & Scard (2015) yang meliputi manipulasi atau pemalsuan catatan akuntansi, kesengajaan penerapan prinsip akuntansi yang tidak sesuai, salah saji pada laporan keuangan, salah saji laporan keuangan atas pencurian, serta salah saji akibat ketidakwajaran perlakuan aktiva. Penilaian indikator menggunakan skala *Likert* 1-5 dengan pilihan jawaban sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Data variabel kecenderungan *fraud* yang dianalisis dalam bentuk numerik berupa nilai total skor jawaban per indikator.

Variabel independen penelitian adalah karakteristik personal (jenis kelamin, usia, pengalaman kerja, dan pendidikan), moralitas individu, efektivitas pengendalian internal, dan budaya etis organisasi. Jenis kelamin adalah perbedaan sifat antara pria (maskulin) dan wanita (feminim) yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang (Barua, Davidson, Rama, & Thiruvadi, 2010; Bishop, Hermanson, & Riley, 2017). Pengukuran menggunakan variabel *dummy*, 1 = laki-laki dan 2 = Perempuan.

Usia adalah rentang kehidupan yang diketahui melalui tahun, bulan dan hari sejak dilahirkan (Pasanda & Paranoan, 2013; Xu, Zhang, & Chen, 2018). Usia diukur dengan jumlah usia responden yaitu pengurus keuangan desa di Kecamatan Sayung dari

sejak lahir hingga saat penelitian ini dilaksanakan yang dihitung dalam satuan tahun. Data usia dikelompokkan sebagai variabel *dummy* dibedakan sebagai 1 = usia 25-35 tahun, 2 = usia 36-46 tahun, 3 = usia 47-57 tahun dan 4 = usia > 57 tahun. Pembagian kelompok usia mengacu pada penelitian Hoi & Robin (2010).

Pengalaman kerja adalah lamanya seseorang dalam memperoleh pengetahuan di bidang tertentu yang dapat meningkatkan sensitivitas terhadap *fraud* (Kern, 2016). Pengalaman kerja diukur dengan jumlah tahun semenjak responden menjabat sebagai perangkat di desa di Kecamatan Sayung hingga saat penelitian ini dilakukan (lama kerja). Lama kerja dalam tahun berikutnya dikelompokkan sebagai variabel *dummy* menjadi: 1 = lama kerja <2 tahun, 2 = lama kerja 3-9 tahun, 3 = lama kerja 10-15 tahun, dan 4 = lama kerja >15 tahun. Pengukuran pengalaman kerja diadopsi dari penelitian Hoi & Robin (2010).

Pendidikan adalah sarana menghasilkan SDM berkualitas (Murphy & Free, 2016). Pendidikan diukur dari pendidikan formal terakhir yang ditamatkan oleh responden. Tingkat pendidikan dibedakan secara *dummy* menjadi pendidikan dasar (SD dan SMP), menengah (SMA), dan tinggi (D3, S1 atau S2). Pengukuran tingkat pendidikan responden juga diadopsi dari penelitian Hoi & Robin (2010).

Efektivitas pengendalian internal adalah proses untuk mencapai keandalan laporan keuangan, kepatuhan hukum, operasi yang efektif dan efisien (Kummer, Singh, & Best, 2015; Lokanan, 2014). Pengukuran menggunakan 5 indikator yang diadopsi dari penelitian Zhou, Wang, Zhou, & Xu (2017) meliputi penerapan tanggung jawab dan wewenang, ipencatatan transaksi, kendali sistem akuntansi dan fisik, pemantauan, serta evaluasi. Efektivitas pengendalian internal diukur dengan skala likert skor 1-5, data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor tiap indikator.

Budaya etis organisasi adalah pedoman tentang perilaku serta ruang lingkup pekerjaan karyawan (Donelson, Ege, & McInnis, 2017). Pengukuran variabel budaya etis organisasi menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Zhou, Wang, Zhou, & Xu (2017), meliputi visibilitas model dan perannya, komunikasi etis, training perilaku etis, sanksi atas perilaku tidak etis, dan

prosedur pelestarian etika. Variabel budaya etis organisasi diukur dengan skala *likert* skor 1-5, data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor tiap indikator.

Moralitas individu adalah hal yang mendasari penilaian atas tindakan individu secara rasional dan sesuai hati nurani (Berger, Perreault, & Wainberg, 2017). Pengukuran variabel moralitas individu diadopsi dari indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian Okura (2013) meliputi: laporan keuangan disajikan dengan akurat, tidak menerima penyuapan dalam bentuk apapun, loyalitas terhadap pekerjaan, standar penyusunan laporan keuangan, dan memperhatikan faktor eksternal serta internal. Variabel moralitas individu diukur dengan skala likert skor 1-5, data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor tiap indikator.

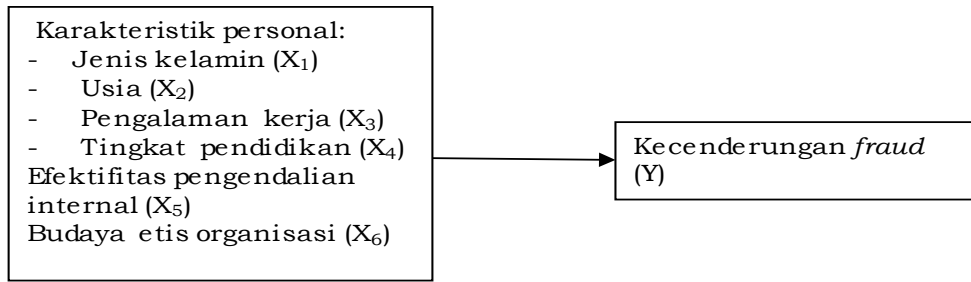
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi *dummy* berganda untuk menguji pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan SPSS V.21. Regresi berganda dengan variabel *dummy* digunakan karena penelitian ini menggunakan variabel yang diukur secara numerik dan kategorik. Variabel *dummy* digunakan apabila variabel independen mempunyai kategori tertentu yang dinyatakan dengan kode 0 atau 1. Variabel *dummy* penelitian termasuk jenis kelamin, usia, pengalaman kerja, dan pendidikan.

Berdasarkan Gambar 1, peneliti kemudian membuat model persamaan. Model tersebut dapat ditelaah pada persamaan sebagai berikut.

$$KKA = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan:

Y	=	kecenderungan <i>fraud</i>
a	=	konstanta
β_1-7	=	koefisien regresi X1 – X7
X1	=	Jenis Kelamin
X2	=	Usia
X3	=	Pengalaman kerja
X4	=	Tingkat pendidikan
X5	=	Efektivitas Pengendalian Internal
X6	=	Budaya Etis Organisasi
X7	=	Moralitas Individu
e	=	nilai residual/ <i>error</i>



Gambar 1. Model Penelitian

Penelitian ini dianalisis dengan uji deskriptif statistik yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase untuk variabel *dummy* dan nilai tendensi sentral yang meliputi nilai minimal-maksimal, rata-rata, dan standar deviasi untuk variabel efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi dan moralitas individu. Pengujian signifikansi penelitian ini menggunakan analisis regresi *dummy* berganda dengan menyertakan uji koefisien determinasi, uji f, serta uji t untuk imengevaluasi pengaruh variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data untuk penelitian berasal dari jawaban kuesioner yang dibagikan secara langsung pada 40 orang perangkat desa di Kecamatan Sayung tahun 2017. Dari 40 kuesioner yang dibagikan, semua kembali dan terisi lengkap sehingga 100% data dari kuesioner tersebut memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam analisis.

Tabel 1 menunjukkan distribusi karakteristik personal responden meliputi usia, jenis kelamin, masa kerja, dan tingkat pendidikan. Usia responden paling banyak di rentang 36-46 tahun (32,5%), diikuti oleh responden usia 25-35 tahun yaitu 12 orang atau 30% sedangkan paling sedikit usia >57 tahun yaitu sebanyak 4 orang atau 10%. Responden penelitian ini didominasi oleh perangkat desa yang masih baru. Responden penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki (95%), karena karakteristik profesi perangkat desa lebih memerlukan lebih banyak waktu dalam pekerjaannya sehingga lebih memilih laki-laki untuk menjadi perangkat desa.

Sebagian responden penelitian ini 50% memiliki pengalaman kerja < 2 tahun, responden berpengalaman kerja > 15 tahun

sebanyak 27,5%, dan responden dengan pengalaman kerja antara 3-9 tahun sebanyak 20% dan 2,5% responden memiliki pengalaman kerja 10-15 tahun. Hal ini menunjukkan perangkat desa di Kecamatan Sayung belum memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena didominasi oleh perangkat desa yang memiliki pengalaman kurang dari 2 tahun.

Sebagian besar responden 62,5% berpendidikan terakhir SMA, 20% berpendidikan terakhir S1, 10% berpendidikan terakhir SMP, dan masing-masing sebanyak 2,5% berpendidikan terakhir SD dan D3. Hal ini karena pada umumnya standar pendidikan untuk dapat bekerja sebagai perangkat desa minimal SMA.

Setelah menelaah deskripsi responden, peneliti kemudian melakukan analisis statistik deskriptif. Tabel 2 menyajikan deskripsi dari variabel efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan moralitas individu.

Tabel 2 menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal (X5) memiliki total skor berkisar antara 19-25 dengan standar deviasi 1,933 dan rata-rata sebesar 22,18 dan jika dibagi dengan 5 indikator diperoleh nilai 4,44 yang artinya rata-rata responden setuju atas pernyataan-pernyataan yang mewakili variabel efektivitas sistem pengendalian internal. Budaya etis organisasi (X6) memiliki total skor berkisar antara 15-25 dan standar deviasi 2,510 dengan rata-rata sebesar 20,82 yang jika dibagi dengan 5 indikator diperoleh nilai 4,17 yang artinya rata-rata responden setuju atas pernyataan-pernyataan yang mewakili variabel budaya etis organisasi. Moralitas individu memiliki total skor berkisar antara 15-25 dan standar deviasi 2,835 dengan rata-rata sebesar 21,62 yang jika diba-

Tabel 1. Deskripsi Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Usia		
25-35 th	12	30%
36-46 th	13	32,50%
47-57 th	11	27,50%
> 57 th	4	10%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	38	95%
Perempuan	2	5%
Masa Kerja		
< 2 th	20	50%
3-9 th	8	20%
10-15 th	1	2,50%
>15 th	11	27,50%
Tingkat pendidikan		
SD	1	2,50%
SMP	4	10%
SMA	25	62,50%
D3	1	2,50%
S1	8	20%
S2	1	2,50%

gi dengan 5 indikator diperoleh nilai 4,33 yang artinya rata-rata responden setuju atas pernyataan-pernyataan yang mewakili variabel moralitas individu. Sementara itu, kecenderungan *fraud* memiliki total skor berkisar antara 5-16 dan standar deviasi 2,893 dengan rata-rata sebesar 8,30 yang jika dibagi dengan 5 indikator diperoleh nilai 1,66 yang artinya rata-rata responden tidak setuju atas pernyataan-pernyataan yang mewakili variabel kecenderungan *fraud*.

Analisis statistik berikutnya dari penelitian ini adalah pengujian hasil statistik Pengujian ini meliputi uji kelayakan model

menggunakan uji F (efek simultan), koefisien determinasi, dan parsial. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3, 4, dan 5.

Langkah pertama pengujian adalah pengujian kelayakan model (melalui uji f). Hasil uji anova (*f test*) pada Tabel 3 diperoleh nilai p sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Artinya, karakteristik personal responden dan tiga variabel independen lainnya (pengendalian internal, budaya etis organisasi dan moralitas individu) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

Langkah kedua adalah uji koefisien determinasi. Pengujian ini dilakukan untuk

Tabel 2. Hasil statistik deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
Efektivitas pengendalian internal	19	25	22,18	1,933
Budaya etis organisasi	15	25	20,82	2,51
Moralitas individu	15	25	21,62	2,835
Kecenderungan <i>fraud</i>	5	16	8,3	2,893

Tabel 3. Hasil Uji F

	Jumlah Kuadrat	DK	Rata-Rata	F	P Value
Regresi	261,902	12	21,825	9.14	0
Residual	64,498	27	2,389		
Total	326,4	39			

mengetahui seberapa besar model rancangan peneliti mampu menjelaskan seluruh fenomena yang ada. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil pengujian koefisien determinasi pada Tabel 4 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,714. Artinya, 71,4% variabel kecenderungan *fraud* dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas karakteristik responden, sedangkan variabel lain yang mempengaruhi *fraud* sebesar 28,6%. Daya penjas dari variabel-variabel bebas dalam penelitian ini mendekati 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas tersebut representatif untuk memprediksi kecenderungan *fraud*.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis regresi regresi *dummy* berganda. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 5.

Pengaruh jenis kelamin pada kecenderungan *fraud*. Hasil pengolahan data pada Tabel 5 untuk variabel jenis kelamin (X1) memperlihatkan nilai probabilitas 0,408 ($p > 0,05$). Hal tersebut mengindikasikan bahwa jenis kelamin tidak memiliki pengaruh pada kecenderungan *fraud*. Artinya, perbedaan jenis kelamin memiliki peluang yang sama untuk melakukan tindakan kecurangan akuntansi. Saat ini pelaku korupsi tidak hanya didominasi oleh laki-laki tetapi juga oleh perempuan. Kemunculan banyak nama perempuan idalam jeratan kasus korupsi di negeri ini menyiratkan adanya emansipasi perempuan pada berbagai bidang yang telah berjalan dengan baik termasuk juga pada ranah korupsi (feminisasi korupsi). Asumsi yang dapat diambil adalah uang tidak punya jenis kelamin dan tidak bisa memilih siapa yang menjadi pemiliknya. Siapapun tentunya mempunyai 'bakat' korupsi asalkan ada niat dan kesempatan yang tepat untuk melakukan *fraud*.

Sampel penelitian ini didominasi oleh

laki-laki (95%) sehingga perbedaan proporsi jenis kelamin menjadi tidak representatif untuk bisa melihat perbedaan kecenderungan *fraud* yang dilakukan. Boritz, Kochetova-Kozloski, & Robinson (2015) menyebutkan bahwa 87% pelaku *fraud* adalah laki-laki. Studi di China juga menyebutkan bahwa tingkat kecurangan laporan keuangan lebih tinggi dilakukan oleh laki-laki (Sun, Kent, Qi, & Wang, 2017). Pada penelitian sebelumnya Himmah (2013) dan Hossain, Chapple, & Monroe (2016) melaporkan bahwa aspek nilai, etika pemerintahan negara, pedoman sikap, dan akuntabilitas perempuan lebih baik daripada laki-laki. Namun, ada ketidaksetaraan gender yang signifikan sampel penelitian mereka, khususnya dalam hal kendali dan manfaat bagi perempuan di setiap kegiatan yang diikuti. Implikasinya, partisipan perempuan tidak dapat ikut berpartisipasi dalam tindakan pencegahan korupsi.

Jenis kelamin yang tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* ini jika dikaitkan dengan teori keagenan terjadi karena siapa pun bisa melakukan kecurangan karena masing-masing pihak baik prinsipal maupun agen menginginkan terpenuhinya kepentingan mereka sendiri-sendiri. Pemerintah pusat yang mewakili rakyat sebagai *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada laporan keuangan yang angka-angka di pos pembelanjaan sesuai dengan angka-angka yang diajukan dalam proposal pengucuran dana desa, sementara pihak pemerintah desa sebagai agen akan berusaha menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan pemerintah pusat agar di masa mendatang bisa kembali memperoleh kucuran dana karena laporan keuangan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Murthy & Jack (2017) berargumentasi bahwa teori keagenan individu cenderung bertindak sesuai dengan kepentingannya

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

R	R Kuadrat	R Kuadrat Disesuaikan	Std. Error Estimasi
0,896	0,802	0,714	1,546

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Dummy Berganda

Variabel	Koefisien tidak distandarisasi		Koefisien distandarisasi	T	P Value
	B	Std. Error	Beta		
Konstanta	39.783	4.472		8.895	0
Jenis kelamin	-1.038	1.235	-0.079	-0.84	0.408
Usia 25-35 tahun	0.971	0.65	0.156	1.493	0.147
Usia 36-46 tahun	-0.963	0.65	-0.158	-1.482	0.15
Usia 47-57 tahun	-1.526	0.74	-0.239	-2.064	0.049
Usia > 57 tahun	-6.05	2.014	-0.635	-3.004	0.006
Lama kerja <2 tahun	-1.288	0.77	-0.225	-1.671	0.106
Lama kerja 3-9 tahun	-2.995	0.949	-0.419	-3.157	0.004
Lama kerja 10-15 tahun	-2.774	1.839	-0.152	-1.509	0.143
Lama kerja > 15 tahun	1.236	0.778	0.193	1.589	0.124
Pendidikan dasar	-0.925	1.788	-0.107	-0.517	0.609
Pendidikan menengah	-0.691	0.691	-0.117	-1.001	0.326
Pendidikan tinggi	0.282	2.01	0.043	0.14	0.889
Efektifitas pengendalian internal	-1.014	0.213	-0.677	-4.766	0
Budaya etis organisasi	0.216	0.153	0.188	1.41	0.17
Moralitas individu	-0.454	0.129	-0.445	-3.532	0.002

sehingga muncul asimetri informasi antara prinsipal dan agen dan sebagai wujudnya adalah *fraud* dalam pelaporan keuangan atau laporan realisasi pertanggungjawaban pembelanjaan dana desa, di mana tindakan *fraud* tersebut bisa saja dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Jika dikaitkan dengan teori GONE, jenis kelamin yang tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* ini lebih disebabkan oleh adanya keserakahan (*greed*), ada tidaknya kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan konsekuensi dari tindakan *fraud* (*exposure*) yang dianggap sebagai hal wajar tampak dari wajah-wajah koruptor di media massa yang terlihat santai-santai saja ketika diberitakan sebagai pelaku korupsi. Keserakahan, kesempatan melakukan *fraud*, pemenuhan kebutuhan pribadi, dan *exposure* dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang dilaporkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2004 bahwa *fraud* tidak mengenal jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa pelaku *fraud* bisa dilakukan oleh siapa pun tidak memandang perbedaan jenis kelamin. Perempuan juga berkemungkinan melakukan *fraud* seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki. Namun, perempuan juga bisa menjadi pelaku pencegah tindakan *fraud* jika ada kesetaraan *gender* dalam melakukan kendali atau pengawasan penggunaan dana yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk kepentingan publik. Implikasi untuk penelitian mendatang dapat menggunakan proporsi sampel yang seimbang antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) sehingga dapat diketahui pengaruh sebenarnya dari jenis kelamin pada kecenderungan *fraud*.

Pengaruh usia pada kecenderungan *fraud*. Berdasarkan karakteristik usia (X₂) pada Tabel 5, rentang usia yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* adalah usia 47-57 tahun dan usia lebih dari 57 tahun ($p < 0,05$). Kedua tingkatan usia tersebut secara signifikan

berpengaruh negatif (koefisien regresi sebesar -1,526 dan -6,050) terhadap kecenderungan *fraud*. Hasil temuan menjelaskan bahwasanya usia berpengaruh negatif pada kecenderungan *fraud* untuk rentang usia lebih dari 47 tahun. Usia seseorang berdampak pada pemikiran etisnya. Seiring bertambahnya usia, individu akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal. Dengan kata lain, semakin tinggi usia seseorang, moralitas yang dimiliki juga tinggi dan mengakibatkan turunnya perilaku tidak etis serta kecenderungan untuk melakukan *fraud*. Hasil penelitian ini mengindikasikan semakin tua usia perangkat Pemerintah Desa di Kecamatan Sayung, semakin rendah pula kecenderungan *fraud* pada Pemerintah Desa Kecamatan Sayung. Hasil temuan ini mendukung penelitian Mihret (2014) bahwa usia berpengaruh pada kecenderungan *fraud*.

Pengaruh negatif pada usia yang lebih tua (>47 tahun) dengan kecenderungan *fraud* jika dikaitkan dengan teori keagenan terjadi karena pada usia yang lebih tua seseorang lebih memilih untuk menghindari risiko (*risk aversion*). Risiko dalam hal ini di antaranya adalah risiko harus berurusan dengan KPK, risiko menanggung malu karena dianggap melakukan penyelewengan dana publik, dan risiko menanggung dosa atas perilaku kecurangan yang mereka lakukan. Literatur tentang usia umumnya sering dikaitkan dengan perilaku *risk averse*, usia berpengaruh pada respon dan pola pikir individu pada risiko yang mereka hadapi, bertambahnya usia personal akan meningkatkan reaksi mereka pada risiko yang terdeteksi. Usia sering dihubungkan secara langsung dengan perilaku menghindari risiko, di mana semakin tua usia seseorang, makin tinggi kecenderungan mereka untuk menghindari risiko. Dikaitkan dengan teori GONE, usia yang lebih tua dapat mempersempit peluang (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan, berkurangnya tingkat keserakahan, berkurangnya keinginan untuk memperkaya diri sendiri, dan memiliki rasa malu lebih tinggi jika memiliki predikat sebagai seorang pelaku *fraud*. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Cognitive Moral Development* (CMD) yang dikemukakan oleh Kohlberg (1984) bahwa seiring dengan meningkatnya usia seseorang, akan semakin meningkat pemahaman dan pengertian tentang aturan berperilaku etis. Pada usia yang lebih tua moralitas seseorang umumnya lebih tinggi karena merasa

dekat dengan akhir hidup dan lebih memilih jalan yang baik di sisa-sisa usianya. Temuan penelitian ini juga relevan yang dilaporkan dalam survei *Fraud* Indonesia (2016) di mana *fraud* paling banyak dilakukan pada individu usia 36-45 tahun atau berada pada posisi usia sangat produktif dengan ambisi dan tingkat kebutuhan untuk memiliki *lifestyle* mewah masih tinggi.

Implikasi dari penelitian ini adalah memposisikan perangkat desa dengan usia minimal 47 tahun sebagai penasehat bagi para perangkat desa yang berusia lebih muda untuk menghindari tindakan *fraud* pada pemerintahan desa. Perlu diberikan edukasi kepada para perangkat desa junior bahwa *fraud* merugikan negara dan seluruh masyarakat. Perlu ditekankan bahwa dari segi ideologi *fraud* adalah salah dan dosa, *fraud* merupakan tindakan tidak etis dan amoral, melanggar undang-undang serta edukasi-edukasi lain yang ditujukan untuk mengonstruksi dan memelihara integritas pemerintahan desa.

Pengaruh pengalaman kerja pada kecenderungan *fraud*. Berdasarkan karakteristik pengalaman kerja (X3) pada Tabel 5, pengalaman kerja kurang dari 10 tahun terbukti berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* ($p=0,004$), sedangkan pengalaman kerja kurang dari 2 tahun dan minimal 10 tahun tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* ($p = 0,106$ dan $p = 0,143$). Hasil ini menunjukkan bahwa perangkat desa dengan pengalaman kerja lebih sedikit (3-9 tahun) cenderung bersikap lebih hati-hati dalam menyusun laporan keuangan sehingga terhindar dari kecenderungan *fraud*. Pengalaman kerja dalam penelitian ini diukur dari masa kerja, terdapat dugaan karena perangkat desa menginginkan bisa bekerja lebih lama sebagai perangkat kelurahan sehingga mereka berusaha untuk memiliki kinerja yang baik. Ketatnya pengawasan dari pihak Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal pengucuran dana desa yang berasal dari Pemerintahan Pusat atau Daerah menyebabkan mereka lebih berhati-hati dalam menyusun atau melaporkan laporan keuangan dengan sebenarnya.

Pengalaman kerja dari perangkat desa yang minimal 10 tahun tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* bisa disebabkan sudah terlalu seringnya melihat tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pimpinan misalnya mengubah catatan akuntansi, menghilangkan pengeluaran

anggaran yang tidak dialokasikan secara sebenarnya, melakukan manajemen laba, menerima pembayaran fiktif atau *illegal* atau menjual aset desa dengan harga murah. Sementara itu, para perangkat yang lebih senior ini juga tidak memiliki keberanian untuk mengingatkan pimpinan sehingga mereka bersifat apatis tidak peduli dengan kualitas laporan keuangan pemerintahan desa. Menurut teori Donald R. Cressey tentang segitiga *fraud*, hal yang dilakukan oleh perangkat desa yang lebih senior tersebut terkait dengan kemungkinan adanya *pressure* atau tekanan dari pimpinan, menganggap tindakan *fraud* sebagai rasionalisasi, dan persepsi peluang *fraud* memang lebih mungkin dilakukan oleh pimpinan.

Pengaruh negatif dari pengalaman kerja yang lebih pendek (<10 tahun) terhadap kecenderungan *fraud* jika dikaitkan dengan teori keagenan disebabkan perangkat desa dengan pengalaman kerja lebih pendek juga berusaha untuk menghindari atau tidak menyukai risiko (*risk aversion*) sehingga mereka berusaha melaporkan kondisi keuangan desa secara hati-hati dan berusaha melaporkan yang sebenarnya, sedangkan dikaitkan dengan teori GONE terkait dengan dampak yang akan diterima (*exposure*) yaitu disebut sebagai perampok uang rakyat dan akan dipidanakan, maka mereka juga berusaha untuk tidak melakukan kecurangan. Berdasarkan laporan ACFE 2016 disebutkan bahwa pekerja dengan masa kerja lebih singkat belum memiliki pengalaman tentang celah-celah untuk melakukan *fraud* dan kurang memiliki keberanian untuk mengingatkan tindakan *fraud* yang dilakukan pihak pimpinan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlu diingatkan kembali pada perangkat desa yang lebih senior untuk lebih berani dalam mengingatkan pihak pimpinan jika mereka melakukan kesalahan atau penyimpangan kinerja terutama dalam hal laporan keuangan. Perangkat desa senior diharapkan dapat berperilaku lebih etis dan bermoral tinggi sehingga mampu mengingatkan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pimpinan atau rekan kerja mereka sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam penelitian Donelson, Ege, & McInnis (2017) dan Kern (2016) bahwa semakin tinggi pengalaman kerja seseorang, semakin baik kualitas penyajian akuntansi yang dilakukan atau semakin tinggi kemampuannya dalam mendeteksi *fraud*. Implikasi hasil pene-

litian ini untuk penelitian mendatang adalah menilai pengalaman kerja dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan perangkat desa dalam menguasai bidang pekerjaan yang saat ini sedang ditekuni yaitu dalam hal penyusunan laporan keuangan pemerintah desa.

Pengaruh tingkat pendidikan pada kecenderungan *fraud*. Karakteristik tingkat pendidikan (X4) pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa baik tingkat pendidikan dasar, menengah, ataupun tinggi, masing-masing tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* ($p > 0,05$). Kecenderungan *fraud* bisa dilakukan baik oleh perangkat desa dengan pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Berdasarkan laporan ACFE 2016 pendidikan di Indonesia lebih mengutamakan *hardskill* daripada *softskill*. Pendidikan *hardskill* hanya mengutamakan keahlian sehingga *fraud* bisa dilakukan oleh siapa pun tanpa memandang tingkat pendidikannya. Berbeda jika selain *hardskill* juga ditekankan pendidikan *softskill* di mana diutamakan pentingnya proses kejujuran, integritas, beretika, komitmen, jujur, berargumentasi logis, dan lainnya. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Mihret (2014) yang menunjukkan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kecenderungan *fraud*.

Penyebab lain mengapa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* terjadi karena responden penelitian ini didominasi oleh tingkat pendidikan SMA (62,5%) dan tidak diketahui basis pendidikannya apakah dari jurusan akuntansi atau bukan sehingga terdapat dugaan bahwa responden tidak sepenuhnya paham atau memiliki keterbatasan dengan urusan laporan keuangan, dan jika hal ini dihubungkan dengan teori agensi maka termasuk dalam asumsi *bounded rationality* dimana tingkat pendidikan yang lebih rendah menyebabkan manusia menjadi memiliki daya pikir yang lebih terbatas dalam memprediksi persepsi atau dampak kejadian di masa mendatang terkait dengan kondisi laporan keuangan yang mereka susun saat ini. Jenjang pendidikan formal di bidang akuntansi di Indonesia di antaranya melalui jenjang S1 (kesarjanaan), pendidikan profesi akuntan (PPA), S2 (magister), hingga S3 (doktoral). Pendidikan formal dianggap penting dalam penguasaan penyusunan laporan keuangan dan tentunya tidaklah sama hasil penyusunan laporan keuangan oleh individu dengan pendidikan profesional

dibandingkan dengan individu yang hanya bergelar sarjana, terlebih hanya merupakan seorang lulusan pendidikan menengah. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah kepala, sekretaris dan bendahara desa serta kaur pembangunan dengan *basic* pendidikan yang bervariasi dan sebagian besar hanya tamatan SMA serta tidak diketahui pernah tidaknya memperoleh pelatihan tentang akuntansi.

Implikasi dari penelitian ini adalah kecenderungan *fraud* tidak mengenal perbedaan tingkat pendidikan, dapat ditemui pada instansi desa atau kelurahan dengan perangkat atau aparat berpendidikan menengah maupun tinggi. Sebagaimana yang disebutkan dalam teori GONE, untuk mencegah kecenderungan *fraud* perlu dilakukan upaya meminimalisasi *greeds* (keserakahan) dalam diri individu melalui pembentukan perilaku etis, kesalehan, dan moralitas tinggi, mempersempit kesempatan atau peluang (*opportunity*) berlaku curang melalui pengawasan yang ketat, memenuhi kecukupan kebutuhan (*needs*) perangkat atau aparat desa melalui pemberian kompensasi yang sesuai atau memadai, dan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakan kecurangan yang dilakukan (*exposure*).

Pengaruh efektifitas pengendalian internal pada kecenderungan *fraud*. Efektivitas pengendalian internal (X5) pada Tabel 5 terbukti memiliki pengaruh berlawanan (koefisien regresi sebesar 1,014) dengan kecenderungan *fraud* ($p=0,000$). Temuan ini memperlihatkan bahwasannya penerapan pengendalian internal yang semakin efektif akan menekan kecenderungan *fraud* di Pemerintahan Desa se-Kecamatan Sayung. Pengendalian internal dapat mencegah *fraud* yang secara tidak langsung juga dapat menghasilkan informasi yang baik (Liu & Li, 2015). Pengendalian internal yang efektif dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional di bagian keuangan. Pembagian wewenang dan tanggung jawab yang baik, melakukan otorisasi dari pihak yang berwenang, menyertakan bukti pendukung transaksi, pemeriksaan fisik atas kekayaan yang baik, pencatatan yang baik pada setiap kegiatan operasional dan pemantauan dengan menilai kegiatan operasional akan mengakibatkan tingkat kecenderungan *fraud* yang menurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian Donelson, Ege, & McInnis (2017), Andon, Free, & Scard (2015), Hollow (2014), Okura (2013), dan Schwartz (2013)

juga mengemukakan bahwasannya pengendalian internal yang efektif menunjukkan efek berlawanan pada kecenderungan *fraud*.

Hasil penelitian relevan dengan teori keagenan di mana sistem pengendalian internal diperlukan untuk mengawasi perilaku agen (aparat atau perangkat desa) dalam merealisasikan kucuran dana desa sehingga dapat menghalangi tindakan mereka untuk memperkaya diri dengan cara mengorbankan kepentingan prinsipal (publik). Pengendalian/pengawasan termasuk dalam salah satu komponen *good governance*. Kualitas pengendalian yang baik dapat meminimalkan perilaku oportunistik yang ingin dilakukan oleh para aparat desa. Dikaitkan dengan teori GONE, melalui efektifnya pengendalian internal, peluang kecenderungan *fraud* dapat dihindarkan. Burton (2012), Kaplan, Pope, & Samuels (2015), dan Reskino & Anshori (2016) berargumentasi bahwa pengendalian internal adalah cara untuk mengawasi, mengukur, dan mengarahkan sumber daya organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu menjamin tersajinya laporan keuangan dan manajerial yang akurat, penjagaan aset, dan dapat diyakini kebenarannya, dapat mengurangi terjadinya pelanggaran, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari dari kecurangan dan kerugian.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk mencegah kecenderungan *fraud* di pemerintahan desa di Kecamatan Sayung sehingga perlu diterapkan pengendalian internal yang efektif. Keberadaan pengendalian atau pengawasan internal dalam memperkecil munculnya hambatan dalam menyajikan laporan keuangan yang benar, jikapun hambatan tersebut muncul, akan dapat segera diketahui dan dapat dicari penyebabnya sehingga dapat dilakukan perbaikan. Dikaitkan dengan teori keagenan, pengendalian internal yang efektif oleh pihak pemerintah desa selaku agen dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga rakyat sebagai prinsipal merasa puas dengan kinerja agen.

Pengaruh budaya etis organisasi pada kecenderungan *fraud*. Budaya etis organisasi (X6) pada Tabel 5 tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* ($p=0,170$). Budaya organisasi seharusnya dapat mendorong setiap anggota organisasi bertindak sesuai dengan penetapan etika bisnis agar

pengendalian internal dapat berjalan lancar dan kecenderungan *fraud* dapat dicegah (Donelson, Ege, & McInnis, 2017). Namun, kecenderungan *fraud* ini juga dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri individu itu sendiri seperti motivasi, pengalaman, kemampuan berpikir, kesalahan diri, dan moralitas maka, jika pengaruh faktor internal dalam diri individu lebih kuat daripada pengaruh dari faktor eksternal, budaya etis organisasi atau lingkungan yang baik pun tidak akan mampu mencegah individu untuk melakukan kecenderungan *fraud*. Selain dari faktor internal, kecenderungan *fraud* bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan di luar organisasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Doig (2014) yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh pada kecenderungan *fraud*.

Budaya etis organisasi yang kokoh menurut teori agensi dapat menurunkan kecenderungan *fraud*. Dengan membangun budaya etis organisasi perilaku seseorang dapat terpengaruh dan budaya organisasi yang etis diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kinerja organisasi. Budaya etis organisasi yang baik dapat mengantarkan organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Namun, budaya etis organisasi juga dipengaruhi oleh komitmen individu terhadap organisasi sehingga budaya etis organisasi tidak dapat secara langsung mempengaruhi kecenderungan *fraud* yang dilakukan oleh aparat atau perangkat desa apabila tidak disertai dengan komitmen yang tinggi dari aparat desa untuk mematuhi nilai-nilai atau kode etik pemerintahan. Dikaitkan dengan teori GONE, budaya etis organisasi termasuk dalam *fraud triangle theory* di bagian rasionalisasi atau pembenaran sehingga meskipun budaya etis organisasi sudah baik tetapi kalau dalam diri individu merasa meyakini bahwa aktivitas *fraud* yang dilakukan adalah suatu hal yang benar, maka kecenderungan *fraud* tidak dapat dihindari. Pembenaran dari aktivitas *fraud* juga bisa berasal dari perasaan karena telah berjasa terhadap organisasi sehingga menganggap wajar jika mereka menyisipkan imbalan tersebut ke pos keuangan lain untuk bisa mendapatkan imbalan tersebut. Rasionalisasi pelaku *fraud* bisa terjadi karena faktor ketamakan (*greeds*) dan tekanan kebutuhan (*needs*).

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya diterapkan budaya etis organisasi pada pemerintahan desa di Kecamatan Sayung. Contoh penerapan budaya etis or-

ganisasi adalah meyakinkan para aparat pemerintahan desa bahwa tindakan *fraud* merupakan suatu tindakan nonetis dan tidak bermoral, merupakan kesalahan yang merugikan tidak hanya bagi dirinya karena dapat mengantarkannya ke dalam kasus tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara dan nama baik tercemar, tetapi juga pada terbelengkalainya pemenuhan kebutuhan keluarga jika aparat pemerintahan tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Dan kerugian yang lebih luas adalah kerugian bagi negara atau masyarakat.

Pengaruh moralitas individu pada kecenderungan *fraud*. Pengujian terhadap moralitas individu (X7) pada Tabel 5 menunjukkan pengaruh berlawanan pada kecenderungan *fraud* ($p = 0,002$ dan koefisien regresi sebesar $-0,454$), semakin baik moral para perangkat atau aparat Pemerintahan Desa, semakin rendah pula kecenderungan *fraud* di Pemerintahan Desa. Moralitas individu adalah cara bersikap dengan baik dari dalam diri sendiri. Semua tindakan yang ditunjukkan seseorang berasal dari dirinya pribadi tanpa ada campur tangan orang lain. Okura (2013) mengemukakan bahwa tingkat pemikiran moral seseorang berdampak pada perilaku etisnya. Individu bermoralitas tinggi akan menguntungkan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Moralitas individu dikatakan baik jika individu tersebut menyadari kewajiban serta tanggung jawab, bukan kesadaran mengupayakan keuntungan. Temuan tersebut menandakan tingginya nilai moralitas individu akan meningkatkan kejujuran yang dimiliki sehingga kecenderungan *fraud* akan semakin menurun. Selain itu, temuan ini sejalan dengan penelitian Berger, Perreault, & Wainberg (2017) yang mengemukakan bahwa moralitas individu memiliki efek berlawanan dengan kecenderungan *fraud*.

Efek berlawanan moralitas individu pada kecenderungan *fraud* dalam teori keagenan, termasuk dalam asumsi *self interest*, umumnya mementingkan diri sendiri. Namun asumsi *self interest* tersebut dapat dicegah melalui peningkatan moral karena manajemen adalah kumpulan individu yang memiliki tahapan moral dengan tanggung jawab sosial. Manajemen bermoral tinggi kecil kemungkinan melakukan penyimpangan atau kecurangan. Individu dengan moralitas tinggi tidak akan hanya memperhatikan kepentingan pribadi tetapi akan memperhatikan kepentingan yang lebih universal. Semakin tinggi level moral individu semakin

berusaha menghindari perilaku kecurangan yang akan merugikan banyak pihak. Sementara itu, jika dikaitkan dengan teori GONE, moralitas individu yang tinggi dapat menghindarkan seseorang dari keserakahan, tidak mudah tergoda dengan adanya peluang untuk melakukan tindakan fraud, mengutamakan perolehan pendapatan dengan cara yang benar, dan takut dengan konsekuensi hukuman atas *fraud* yang mereka lakukan.

Implikasi dari temuan penelitian ini adalah mengupayakan atau pemupukan moralitas individu perangkat atau aparat Pemerintah Desa yang baik dapat mencegah kecenderungan *fraud* di pemerintahan desa. Upaya pemupukan moralitas individu dapat dilakukan melalui pemberian pembinaan kepada aparat misalnya dalam hal peningkatan iman dan takwa, syukur, sabar, dan peningkatan kesalehan diri, serta penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila baik saat bertugas sebagai perangkat desa maupun dalam aktivitas sehari-hari lainnya.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik personal, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, serta moralitas individu secara bersama-sama berpengaruh pada kecenderungan *fraud*. Secara parsial karakteristik personal yang berpengaruh pada kecenderungan *fraud* adalah usia dan pengalaman kerja dengan arah pengaruh yang negatif. Usia yang berpengaruh pada kecenderungan *fraud* adalah usia lebih dari 47 tahun, sedangkan pengalaman kerja yang berpengaruh pada kecenderungan *fraud* adalah masa kerja 3-9 tahun. Pengendalian internal yang efektif dan moralitas individu secara parsial juga memiliki pengaruh negatif pada kecenderungan *fraud*. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan budaya etis organisasi tidak berpengaruh pada kecenderungan *fraud*. Hal ini merepresentasikan teori agensi dan GONE dalam mencegah *fraud*.

Secara keseluruhan, penelitian ini berimplikasi kepada keharusan bagi pihak terkait untuk mengupayakan pemupukan moralitas individu perangkat atau aparat bagi aparat pemerintah desa. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemberian pembinaan kepada aparat misalnya dalam hal peningkatan iman dan takwa, syukur, sabar, dan peningkatan kesalehan diri. Selain itu, perangkat desa juga harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila, baik saat bertugas sebagai maupun

aktivitas sehari-hari lainnya.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan daerah survei dan menambahkan jumlah responden sebagai objek penelitian. Selain itu, diperlukan penambahan variabel yang dapat meminimalisasi terjadinya kecenderungan *fraud* seperti efektivitas fungsi auditor internal dan aktivitas pengendalian internal pada pemerintah desa. Penelitian sejenis di masa mendatang dapat membedakan latar belakang pendidikan responden apakah dari latar belakang pendidikan akuntansi atau bukan, dan pernah tidaknya mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Andon, P., Clinton, F., & Scard, B. (2015). Pathways to Accountant Fraud: Australian Evidence and Analysis. *Accounting Research Journal*, 28(1), 10-44. <https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2014-0058>
- Barra, R. A. (2010). The Impact of Internal Controls and Penalties on Fraud. *Journal of Information Systems*, 24(1), 1-21. <https://doi.org/10.2308/jis.2010.24.1.1>
- Barua, A., Davidson, L. F., Rama, D. V., & Thiruvadi, S. (2010). CFO Gender and Accruals Quality. *Accounting Horizons*, 24(1), 25-39. <https://doi.org/10.2308/acch.2010.24.1.25>
- Berger, L., Perreault, S., & Wainberg, J. (2017). Hijacking the Moral Imperative: How Financial Incentives Can Discourage Whistleblower Reporting. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 36(3), 1-14. <https://doi.org/10.2308/ajpt-51663>
- Bishop, C. C., Hermanson, D. R., & Riley, R. A. (2017). Collusive Fraud: Leader, Incident, and Organizational Characteristics. *Journal of Forensic Accounting Research*, 22(1), A49-A70. <https://doi.org/10.2308/jfar-51826>
- Boritz, J. E., Kochetova-Kozloski, N., & Robinson, L. (2015). Are Fraud Specialists Relatively More Effective than Auditors at Modifying Audit Programs in the Presence of Fraud Risk? *The Accounting Review*, 99(3), 881-915. <https://doi.org/10.2308/accr-50911>
- Boyle, D. M., DeZoort, F. T., & Hermanson, D. R. (2015). The Effect of Alternative Fraud Model Use on Auditors' Fraud Risk Judgments. *Journal of Accounting and Public Policy*, 34(6), 578-596.

- <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.05.006>
- Burton, F. G. (2012). A Cross-Cultural Study of the Influence of Country of Origin, Justice, Power Distance, and Gender on Ethical Decision Making. *Journal of International Accounting Research*, 11(1), 35-44. <https://doi.org/10.2308/jiar-10222>
- Davies, J. (2017). "It's a Really Grey Area": An Exploratory Case Study into the Impact of the Jackson Reforms on Organised Insurance fraud. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 41, 45-57. <https://doi.org/10.1016/j.ijl-cj.2017.05.002>
- Doig, A. (2014). Roadworks Ahead? Addressing Fraud, Corruption and Conflict of Interest in English Local Government. *Local Government Studies*, 40(5), 670-686. <https://doi.org/10.1080/03003930.2013.859140>
- Donelson, D. C., Ege, M. S., & McInnis, J. M. (2017). Internal Control Weaknesses and Financial Reporting Fraud. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 36(3), 45-69. <https://doi.org/10.2308/ajpt-51608>
- Fitriana, A., & Baridwan, Z. (2012). Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi: Dimensi Fraud Triangle. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(2), 244-256. <https://doi.org/10.18202/jamal.2012.08.7159>
- Gonzalez, G. C., & Hoffman, V. B. (2018). Continuous Auditing's Effectiveness as a Fraud Deterrent. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 37(2), 225-247. <https://doi.org/10.2308/ajpt-51828>
- Himmah, E. F. (2013). Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Mengenai Skandal Etis Auditor dan Corporate Manager. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 26-39. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7180>
- Hoi, C. K., & Robin, A. (2010). Labor Market Consequences of Accounting Fraud. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 10(3), 321-333. <https://doi.org/10.1108/14720701011051947>
- Hollow, M. (2014). Money, Morals and Motives: An Exploratory Study into Why Bank Managers and Employees Commit Fraud at Work. *Journal of Financial Crime*, 21(2), 174-190. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2013-0010>
- Hossain, S., Chapple, L., & Monroe, G. S. (2016). Does Auditor Gender Affect Issuing Going-Concern Decisions for Financially Distressed Clients? *Accounting and Finance*, 56(1), 1-35. <https://doi.org/10.1111/acfi.12242>
- Kaplan, S. E., Pope, K. R., & Samuels, J. A. (2015). An Examination of the Effects of Managerial Procedural Safeguards, Managerial Likeability, and Type of Fraudulent Act on Intentions to Report Fraud to a Manager. *Behavioral Research in Accounting*, 27(2), 77-94. <https://doi.org/10.2308/bria-51126>
- Kartini. (2018). Developing Fraud Prevention Model in Regional Public Hospital in West Sulawesi Province. *International Journal of Law and Management*, 60(2), 210-220. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2017-0095>
- Kern, S. M. (2016). Implementing a "Real-World" Fraud Investigation Class: The Justice for Fraud Victims Project. *Issues in Accounting Education*, 31(3), 255-289. <https://doi.org/10.2308/iace-51287>
- Kuang, Y. F., & Lee, G. (2017). Corporate Fraud and External Social Connectedness of Independent Directors. *Journal of Corporate Finance*, 45, 401-427. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.05.014>
- Kummer, T. F., Singh, K., & Best, P. (2015). The Effectiveness of Fraud Detection Instruments in Not-for-Profit Organizations. *Managerial Auditing Journal*, 30(4/5), 435-455. <https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2014-1083>
- Liu, H., & Li, X. (2015). Government Decentralisation and Corporate Fraud: Evidence from Listed State-Owned Enterprises in China. *China Journal of Accounting Studies*, 3(4), 320-347. <https://doi.org/10.1080/21697213.2015.1100090>
- Mihret, D. G. (2014). National Culture and Fraud Risk: Exploratory Evidence. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 12(2), 161-176. <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2012-0049>
- Murphy, P. R., & Free, C. (2016). Broadening the Fraud Triangle: Instrumental Climate and Fraud. *Behavioral Research in Accounting*, 28(1), 41-56. <https://doi.org/10.2308/bria-51083>
- Murthy, D. N. P., & Jack, N. (2017). Game Theoretic Modelling of Service Agent Warranty Fraud. *Journal of the Opera-*

- tional Research Society*, 68(11), 1399-1408. <https://doi.org/10.1057/s41274-016-0125-z>
- Nikmatuniayah. (2014). Komparasi Evaluasi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 136-148. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7188>
- Okura, M. (2013). The Relationship between Moral Hazard and Insurance Fraud. *The Journal of Risk Finance*, 14(2), 120-128. <https://doi.org/10.1108/15265941311301161>
- Pasanda, E., & Paranoan, N. (2013). Pengaruh Gender dan Pengalaman Audit terhadap Audit Judgment. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 417-429. <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7207>
- Reskino, R., & Anshori, M. (2016). Model Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan oleh Auditor Spesialis Industri dengan Analisis Fraud Triangle. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 256-269. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7020>
- Sun, J., Kent, P., Qi, B., & Wang, J. (2017). Chief Financial Officer Demographic Characteristics and Fraudulent Financial Reporting in China. *Accounting and Finance*, 57(1), 1-31. <https://doi.org/10.1111/acfi.12286>
- Schwartz, M. (2013). Do Not Audit Internal Control Over Financial Reporting—Audit Internal Control! *EDPACS: The EDP Audit, Control, and Security Newsletter*, 48(4), 1-11. <https://doi.org/10.1080/07366981.2013.834713>
- Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Hardinto, W. (2018). Pentingkah Nilai Religiusitas dan Budaya Organisasi untuk Mengurangi Kecurangan?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 156-172. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9010>
- Utami, I., Jori, A., & Hapsari, A. P. S. (2017). Sudikah Akuntan Mengungkap Aib Kecurangan?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 458-469. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7066>
- Xu, Y., Zhang, L., & Chen, H. (2018). Board Age and Corporate Financial Fraud: An Interactionist View. *Long Range Planning*, 51(6), 815-830. <https://doi.org/10.11016/j.lrp.2017.08.001>
- Yang, D., Jiao, H., & Buckland, R. (2017). The Determinants of Financial Fraud in Chinese Firms: Does Corporate Governance as an Institutional Innovation Matter? *Technological Forecasting and Social Change*, 125, 309-320. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.06.035>
- Zhou, J., Wang, S., Zhou, J., & Xu, U. (2017). Measurement of the Severity of Opportunistic Fraud in Injury Insurance: Evidence from China. *Emerging Markets Finance and Trade*, 53(2), 387-399. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1177787>